

**IMPLEMENTASI PASAL 44 JO PASAL 53 PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

HERSADAMAR SANTIKA RAHASTRI

145010107111073



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 44 JO PASAL 53
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO. 6
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI
KOTA KEDIRI

Identitas Penulis :
a. Nama : Hersadamar Santika Rahastri
b. NIM : 145010107111073

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 7 Bulan

Disetujui pada tanggal : 30 November 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, S. H., M. S.
NIP. 195108251979031004

Agus Yulianto, S. H., M. H.
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 44 JO PASAL 53 PERATURAN DAERAH KOTA
KEDIRI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI

Hersadamar Santika Rahastri

NIM : 145010107111073

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 12
Desember 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, S. H., M. S.
NIP. 195108251979031004

Agus Yulianto, S. H., M. H.
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, S. H., M. Si.
NIP. 196208051988021001

Lutfi Effendi, S. H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Desember 2018,

Yang menyatakan,

Hersadamar Santika Rahastri

NIM : 145010107111073



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahNya yang sangat tidak terbatas sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya dalam mengerjakan penelitian skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat serata salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan bagi penulis.

Skripsi ini telah penulis selesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Adapun skripsi ini mempunyai judul yakni **“Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S. H., M. Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Lutfi Effendi, S. H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S. H., M. S., selaku Dosen Pembimbing saya di dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar membimbing saya dan sudah membagikan ilmunya kepada saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
4. Bapak Agus Yulianto, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing saya di dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar membimbing saya dan sudah membagikan ilmunya kepada saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri beserta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang telah membantu memberikan data dan informasi guna penulisan skripsi ini;
6. Kedua orang tua tersayang, yakni Ayahanda dr. G. S. Heru Tribawono, Sp. OG. dan Ibunda Madu Sari, S. H., yang tidak henti-hentinya memberikan

dukungan dengan doa dan memberi semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Kakak saya, Hersadian Pramitha Putri dan Ariya Maulana Nasution beserta keponakan saya Amada Khalifa Nasution dan Arkaffi, yang selalu memberikan support dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman terdekat beserta senior saya (Risca, Kharisma, Ade, Sandi, Lita, Wildan dan yang lainnya) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu menemani, menyemangati, dan menghibur saya sebelum, sesaat, dan sesudah penulisan skripsi ini;

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki laporan Skripsi ini dan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya pembaca. Amin.

Malang, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Implementasi	13
1. Pengertian Implementasi.....	13
2. Tahapan Implementasi Kebijakan.....	14
B. Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah	23
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	23
2. Proses Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah	24
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
1. Pengertian Anak.....	25

2. Hak dan Kewajiban Anak	29
3. Pengertian Hak-Hak Anak	31
D. Kajian Umum Tentang Kota Layak Anak	36
1. Pengertian Kota Layak Anak	36
2. Tujuan Kota Layak Anak	36
3. Dasar Hukum Kota Layak Anak	37
4. Prinsip Kota Layak Anak	42
5. Langkah-Langkah Pengembangan Kota Layak Anak	42
6. Indikator Kota Layak Anak	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengambilan Data	49
E. Lokasi Penelitian	50
F. Populasi dan Sampel	50
G. Teknik Analisis Data	51
H. Definisi Operasional	52
I. Sistematika Penulisan	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri	55
1. Letak Geografis dan Administrasi Kota Kediri	55
2. Visi dan Misi Kota Kediri	57
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri	58
1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri	58
2. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri	58
3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri	61
4. Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri	67
C. Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.....	68
1. Penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.....	68
2. Penerapan Sanksi Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak	74
D. Faktor Kendala serta Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak	76
1. Faktor Kendala Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.....	76
2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak	92
3. Solusi Terhadap Kendala Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	55
Gambar 2	60
Gambar 3	80
Gambar 4	81



RINGKASAN

Hersadamar Santika Rahastri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, IMPLEMENTASI PASAL 44 JO PASAL 53 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini. Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Kota Kediri sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Demi terwujudnya lingkungan kota yang layak terhadap tumbuh kembang anak di Kota Kediri, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 44 tersebut maka telah diatur sanksi terhadap setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakni diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan sanksi pidana pelanggaran tersebut diatur pada pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dari keterangan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri serta di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa Perda tersebut belum mampu mengurangi jumlah permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta selama ini pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak masih hanya sebatas pemberian teguran berupa teguran lisan kepada para pelaku usaha yang telah melanggar Peraturan Daerah terkait.

Perlu adanya solusi bersama berupa a). Upaya Preventif, adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan pelanggaran, yang dalam hal ini penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dengan menerima pelanggan anak dibawah umur pada usaha hiburan. b). Upaya Represif, adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya pelanggaran.

SUMMARY

Hersadamar Santika Rahastri, Administrative of Law, Faculty of Law Brawijaya University, November 2018, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 *juncto* ARTICLE 53 REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY NO. 6/2016 ON IMPLEMENTATION DEVELOPMENT CHILD FRIENDLY CITIES IN KEDIRI, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Children are a population group that has the potential to be developed so that they can actively participate in development. Therefore, child growth and development is a very important development issue in this country. Indonesia began implementing a policy to develop Child Friendly Districts / Cities (KLA) since 2006. Kediri City as one of the cities in East Java Province developed the Child Friendly City policy by issuing the Kediri City Regulation No. 6 of 2016 concerning the Implementation of City Development Child-worthy. For the sake of the realization of a proper city environment towards the development of children in the City of Kediri, based on Article 44 of the Kediri City Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning the Implementation of Child Friendly City Development, every business operation whose activities can interfere with the child's growth and development is prohibited from accepting child visitors. The business operations referred to include discotheques, nightclubs, bars, adult karaoke, pubs, massage parlors, steam bath / sauna parlors and other similar businesses. If there is a violation of the provisions in article 44, then sanctions are imposed on every person and business entity that violates the provision, the conviction is threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). The provisions on criminal sanctions for violations are regulated in Article 53 of the Kediri City Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning the Implementation of Child Friendly City Development. From the information from the interviews with the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in the City of Kediri and in the City Police Unit (Satpol PP) of Kediri City, it can be concluded that the Regional Regulation has not been able to reduce the number of problems arising from the conduct of businesses whose activities can disrupt child growth and during this time giving sanctions to business actors who have violated Article 44 of the Kediri City Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning the Implementation of Child Friendly City Development is still limited to the provision of reprimands in the form of verbal reprimands to business actors who have violated the relevant Regional Regulations.

There needs to be a joint solution in the form of a) Preventive Efforts, is a mitigation effort aimed at preventing and counteracting the occurrence of violations, in this case business operations whose activities can interfere with the child's growth and development by accepting minors customers in entertainment businesses. b) Repressive efforts, are conceptual countermeasures taken after the occurrence of violations.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka dari itu, penting untuk membina mentalitas dan moralitas anak. Mereka adalah aset bangsa yang memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa. Setiap dari mereka juga mempunyai potensi, ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan

¹. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

aktor utama sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat penting untuk meneruskan cita-cita bangsa. Mereka adalah aset bangsa yang memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa. Setiap dari mereka juga mempunyai potensi, ciri, serta sifat khusus yang memerlukan



pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini.

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk pada tahun 2017 mencatat, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 131.579,2 juta jiwa, dan sekitar 11.365,6 diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun.² Hal ini berarti bahwa aset bangsa serta kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang ditentukan oleh lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maka dari itu, penting untuk membina mentalitas dan moralitas anak.

Salah satu hal penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi

². Hasil Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.

tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hal tersebutlah, maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Hal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak Anak) sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention on The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak Anak).³ Bagi negara yang telah meratifikasi konvensi ini, memiliki kewajiban untuk hadir dan melaporkan secara berkala atau setiap tahun terkait kemajuan yang telah dicapai dalam menerapkan konvensi tersebut yakni mengenai perlindungan hak-hak anak dalam negara tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini berarti, ada tiga unsur yang dilibatkan, yakni pemerintah, masyarakat dan

³. Redaksi Elsam, **Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak**, <http://www.elsam.or.id/mobileweb/article>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

dunia usaha. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan seorang anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap anak oleh KPAI yang dimuat dalam Profil KPAI menjelaskan bahwa tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.⁴

Pengertian dari Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁵ Dengan adanya program Kota Layak Anak (KLA) diharapkan dapat menjadi langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah lokal dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan

⁴. David Setyawan, 2017, Tahun 2017, **KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual> , diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 12.00 WIB.

⁵. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. KLA dimaksudkan sebagai suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota.⁶

Semenjak adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif anak khususnya terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria, maka Pemerintah Daerah berlomba-lomba menyusun strategi baru untuk menciptakan kondisi kota yang mampu memberikan perlindungan pada anak tersebut. Selain itu, Kota Layak Anak termasuk salah satu bentuk Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁷ Dengan demikian, Pemerintah Kota Kediri memiliki kewenangan dalam mengatur dan membentuk suatu instrumen Peraturan Daerah untuk mengatur hal tersebut.

Pada tahun 2016, Kota Kediri sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang diharapkan menjadi

⁶. Tim Penyusun, Panduan Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006, hlm 1.

⁷. Pasal 12 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679.

motivasi agar memberikan masa depan yang terbaik bagi anak, sehingga yang menjadi tujuan ini bisa membuahkan hasil yang positif terhadap tumbuh kembang anak-anak di Kota Kediri sendiri.

Seperti yang kita ketahui bahwa masih sering ditemukannya pelanggaran terhadap Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri yakni seperti contoh kasus berikut ditemukannya gadis belia berusia 16 tahun, saat razia gabungan menjelang Bulan Suci Ramadhan yang dilakukan jajaran Satpol PP, Sat Sabhara Polres Kediri Kota pada April 2018, dengan mengaku sebagai pelajar di salah satu SMP swasta di Kota Kediri. Gadis tersebut ditemukan berada di tempat karaoke dewasa yang sedang melayani tamu. Gadis berpakaian minim ini diduga mengonsumsi minuman keras, dengan ditemukan lima botol merk Bali Hai.⁸ Kasus ini membuktikan bahwa Kota Kediri memang membutuhkan perbaikan dalam mewujudkan kota yang ramah akan tumbuh kembang anak-anak di Kota Kediri.

Demi terwujudnya lingkungan kota yang layak terhadap tumbuh kembang anak di Kota Kediri, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud meliputi diskotek, klub malam,

⁸. Gadis Bawah Umur Mengaku Pemandu Lagu di Maya Cafe, <https://duta.co/gadis-bawah-umur-ngaku-pemandu-lagu-diamankan-di-maya-cafe>, diakses pada 20 Oktober 2018

bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis.

Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 44 tersebut maka telah diatur sanksi terhadap setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakni diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan sanksi pidana pelanggaran tersebut diatur pada pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dengan lahirnya kebijakan KLA ini, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti mencoba mengangkat permasalahan mengenai **“Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri”**.

Tabel Orisinalitas

No.	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Hidayat Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Malang	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Malang Kota Layak Anak (MAKOLA) Melalui Penyediaan Pendidikan	1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan MAKOLA melalui penyediaan pendidikan? 2. Bagaimana progres penerapan MAKOLA?	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan MAKOLA berdasarkan penyediaan pendidikan. Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya, dimana skripsi penulis membahas mengenai bagaimana implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang berfokus kepada perlindungan tumbuh

					kembang anak dari kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
2.	2017	Anastasia Cynthia A. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Pengaturan Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif untuk Anak Terlantar Ditinjau dari <i>Convention on the Rights of the Child</i>	1. Bagaimana pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada Kabupaten Layak Anak di Sleman berdasarkan Konvensi Hak Anak? 2. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung yang muncul dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi lingkungan	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak anak mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di Kabupaten Layak Anak Sleman berdasarkan Konvensi Hak Anak. Perbedaannya terletak pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian terdahulu yakni <i>Convention on the Rights of the Child</i> , sedangkan penelitian dalam skripsi ini menggunakan Peraturan

				keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di Sleman?	Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri.
--	--	--	--	---	---



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri?
2. Apa saja faktor kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penelitian hukum ini yang berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan penelitian hukum empiris khususnya di bidang penyelenggaraan pengembangan Kota Layak Anak.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hukum Administrasi Negara sehingga dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam penyusunan peraturan daerah guna mendukung keberhasilan program Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kediri.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.² Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung

¹ Nurdin Usman, 2004, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 89.

² Syaukani, dkk, 2004, Otonomi Dalam Kesatuan, Yogyakarta : Yogya Pustaka, hal 295.

atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³

Syukur mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁴

2. Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan,

³ Abdul Solihin Wahab, 2005, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, hal 65.

⁴ Nyoman.I Surmayadi, 2005, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta : Citra Utama.

bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:⁵

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

⁵ William Dunn, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal: 24.

Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggotamentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-

rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian / Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Meter dan Horn mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:⁶

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards Objecties*)

⁶ Sujianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik, Pekanbaru : Alaf Riau, hal. 35.

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Eksospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu:

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan;

- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan;
- 3) Bagaimana sifat umum; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait;
- 4) Apakah kelompok *elite* menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan;
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan);
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak;
- 3) Intensitas dari respon pelaksana.

Enam variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan

kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Grindle mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.⁷ Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program.

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga penguasa;
3. Keputusan dan daya tanggap.

B. Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

⁷ Ryant Nugroho Dwijowijoto, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hal. 174.

Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁸ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁹

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan

⁸ Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 202.

⁹ Bagir Manan, 1995, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung: LPPM Universitas Bandung, hlm. 8.

wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- a) Transparansi/keterbukaan
- b) Partisipasi
- c) Koordinasi dan keterpaduan.

2. Proses Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM,

¹⁰ Srijanti & A. Rahman, 2008, *Etika Berwarga Negara*. (ed.2), Jakarta: Salemba Empat, hlm. 106-107.

ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.

- f) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak.¹² Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

Pengertian anak berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu.¹³ Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang.

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² <http://kamusbahasaIndonesia.org/anak/mirip> diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

¹³ <http://thelawdictionary.org/child/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The child)

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.¹⁴

2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁵

3. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.¹⁶

4. UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund)

UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi

¹⁴ Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

¹⁵ Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁶ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.¹⁷

5. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang– Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹⁸

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses

¹⁷ www.unicef.org/indonesia/id/ diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

¹⁸ Pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa.¹⁹ Dengan tumbuhnya sang anak, maka sang anak tersebut akan terus menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir tindakannya dan hal inilah yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang tua. Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang demikian. Pada akhirnya para orang tua ini harus bersikap tegas, setidaknya mulai dari saat-saat tersebut, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabarannya dan menjadi marah.²⁰

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian religius akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan istimewa.²¹ Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian

¹⁹ Gunarsa, Singgih, D, 1985, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 3

²⁰ Spock, Benyamin, 2000, Menghadapi Anak di Saat Sulit, Jakarta, Pustaka Delapratasa, hlm. 127

²¹ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

anak, hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu.

Suryana menyatakan, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.²²

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Didalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.²³

²² <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2018

²³ Sunggono, Bambang, Harianto, Aries, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 44

Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif.²⁴

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini, setiap orang berhak

²⁴ Bertens, K., 2007, Etika, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 177.

mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Setiap anak berkewajiban untuk :²⁵

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Pengertian Hak-Hak Anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁶ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.²⁷

²⁵ Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak juga berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar. Setiap anak berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.²⁸

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.²⁹

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Undang-Undang

²⁸ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³⁰

Selanjutnya undang undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- 3) penelantaran,
- 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan,
- 5) ketidakadilan, dan
- 6) perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 Angka (2) undang undang tersebut menyebutkan, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Angka (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.³¹ Pasal 14 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

³⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³¹ Pasal 13 Angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³²

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan;
- 6) Kejahatan seksual.³³

Pasal 16 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Angka (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Angka (3) menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁴

³² Pasal 14 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³³ Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Kajian Umum Tentang Kota Layak Anak

1. Pengertian Kota Layak Anak

Pengertian Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 adalah “Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”³⁵

Sedangkan pengertian Kota Layak Anak menurut Unicef adalah *“The concept of Child Friendly Cities is equally applicable to governance of all communities which include children – large and small, urban and rural. The framework is intended to provide a foundation for adaptation to suit all localities.”*³⁶ Menurut Unicef konsep Kota Ramah Anak (Layak Anak) adalah penerapan tata kelola yang berlaku pada semua komunitas termasuk anak-anak yang sudah besar maupun anak-anak kecil, baik di desa maupun di kota sebagai kerangka kerja dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar yang sesuai dengan tempat tinggalnya.

2. Tujuan Kota Layak Anak

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-

³⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Indikator Kota Layak Anak, Pasal 1 angka 3

³⁶ Unicef-Innocenti Research Centre, 2004, Building Child Friendly Cities, A Framework for Action, UNICEF, Florence.

Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

3. Dasar Hukum Kota Layak Anak

a. Tingkat Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28a ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- 2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.”

- 3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

“Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.”

- 4) UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

“Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.”

- 5) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

“Mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

6) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

7) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”

8) UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

“Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.”

9) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan,

perlindungan, pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

10) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Kewarganegaraan

“Anak WNI diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.”

11) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.”

12). UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.”

13). UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.”

b. Komitmen Internasional

i. World Fit For Children (WFC)

Terdapat 4 bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi WFC:

1. Promosi hidup sehat;

2. Penyediaan pendidikan yang berkualitas;
3. Perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan
4. Penanggulangan HIV/AIDS.

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak:

5. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
6. Membasmi kemiskinan;
7. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
8. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
9. Memberikan pendidikan bagi semua anak;
10. Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;
11. Melindungi anak dari peperangan;
12. Memberantas HIV dan AIDS;
13. Mendengarkan anak dan pastikan anak berpartisipasi;
14. Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak.

ii. Convention on The Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak, meliputi:

1. Hak atas kelangsungan hidup;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Hak atas perlindungan;
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

iii. Millenium Development Goals (MDGs) yang menekankan delapan tujuan, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Memastikan pendidikan dasar untuk laki-laki dan perempuan;
3. Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan ibu hamil;
6. Menangani HIV/AIDS;
7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global.

4. Prinsip Kota Layak Anak

Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:³⁷

³⁷ Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Pasal 3

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Budaya dan kearifan lokal;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Penghargaan terhadap kepentingan anak.
5. Langkah-Langkah Pengembangan Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, langkah-langkah pengembangan Kota Layak Anak (KLA) meliputi peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data dasar, perencanaan yang terdiri penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan KLA. Dalam melaksanakan pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengembangan KLA tersebut:

- a. Peningkatan Komitmen

Peningkatan komitmen bertujuan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi :

- Perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- Perwakilan anak;
- Lembaga Legislatif;
- Lembaga Yudikatif;
- Dunia usaha;
- Tokoh agama/masyarakat adat;
- Masyarakat.

Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

c. Pengumpulan Data Basis KLA dengan tujuan

1. Untuk mengembangkan kebijakan;
2. Untuk menentukan fokus program;
3. Untuk menyusun kegiatan prioritas.

e. Penyusunan Rencana Aksi Dearah (RAD) KLA

1. Sesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstrada, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota;
2. Integrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah agar berkelanjutan;
3. Sesuaikan dengan potensi, kondisi sosial budaya dan ekonomi daerah;
4. Pastikan tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran) untuk pelaksanaan RAD KLA; dan

5. Libatkan Organisasi/Forum/Kelompok Anak.

f. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

1. Pastikan RAD KLA dilaksanakan oleh seluruh SKPD terkait;
2. Pastikan pelaksanaan KLA dilakukan secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan.

g. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa di kabupaten/kota bersangkutan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

h. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Hal ini dilakukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota maupun dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

i. Pelaporan KLA

1. Dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;

2. Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.³⁸

6. Indikator Kota Layak Anak

Indikator dari Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah:³⁹

1. Penguatan kelembagaan; dan
2. Klaster Hak Anak.

6.1. Penguatan Kelembagaan

Indikator KLA untuk penguatan kelembagaan meliputi:⁴⁰

- a. Adanya peraturan-perundangan dan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA).
- b. Persentase Anggaran untuk PHPA, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
- c. Tersedianya SDM yang terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- d. Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA.
- e. Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA.
- f. Jumlah kegiatan inovatif.

Klaster Hak Anak

³⁸ Lenny Rosalin, dkk, Kabupaten/Kota Layak Anak Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hal. 7-8.

³⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 5 ayat (2)

⁴⁰ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 6

Klaster hak anak dibagi menjadi 5 bagian, yakni:

a. Hak sipil dan kebebasan;

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam, meliputi:⁴¹

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam, meliputi:⁴²

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:⁴³

⁴¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 huruf a.

⁴² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 huruf b.

- a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - d. jumlah Pojok ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:⁴⁴
- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

⁴³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 huruf c

⁴⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 huruf d.

f. Perlindungan khusus.

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus, meliputi:⁴⁵

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

⁴⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 huruf e.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian².

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.

¹ Bambang Waluyo, 2005, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 15.

² Ibid, hal. 16

Adapun alasan lain karena penelitian ini menggambarkan suatu kenyataan, terkait implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kediri tentang penyelenggaraan pengembangan kota layak anak.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan³. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pengimplementasian Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.
2. Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup berita tentang kebijakan Pemerintah Kota Kediri terkait dalam penyelenggaraan kota layak anak, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan. Data sekunder dalam skripsi ini adalah :
 - a. Buku-buku kepustakaan dan artikel;
 - b. Dokumen (arsip, laporan).

D. Teknik Pengambilan Data

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara :

³ P. Joko Subagyo, 1997, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, hal : 34.

- a. Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
- b. Wawancara dengan Staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan data dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, PDIH, serta studi pustaka terhadap literatur maupun terhadap bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri;
- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisis yang diteliti yang memiliki kriteria tertentu. Pada penelitian ini populasi yang diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri serta Kantor Satuan Polisi Pamog Praja Kota Kediri.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri yakni Bapak Sumedi, SKM., M. M., Kepala Bidang Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Kediri yakni Bapak Mutakalim serta Staff Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kediri yakni Ibu Marina Dewi R..

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁴ Peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *Purposive Sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

⁴ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Jakarta, Gramedia, Hal 300

(DP3AP2KB) Kota Kediri dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terkait dengan implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam penyelenggaraan pengembangan kota layak anak di Kota Kediri, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai suatu kesatuan utuh.

H. Definisi Operasional

- Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
- Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum,

maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun mengenai teori-teori tersebut antara lain tinjauan umum mengenai implementasi yang mencakup pengertian dan tahapan implementasi kebijakan, tinjauan umum mengenai peraturan daerah yang mencakup pengertian dan proses mekanisme pembentukan peraturan daerah. Tinjauan umum mengenai anak yang mencakup pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pengertian hak-hak anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak. Dan tinjauan umum yang terakhir adalah tinjauan mengenai Kota Layak Anak yang mencakup pengertian, tujuan, dasar hukum, prinsip, langkah-langkah pengembangan KLA, serta indikator KLA.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data yang digunakan, serta teknik analisis data, definisi operasional beserta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri serta faktor kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam penyelenggaraan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.

BAB V : PENUTUP

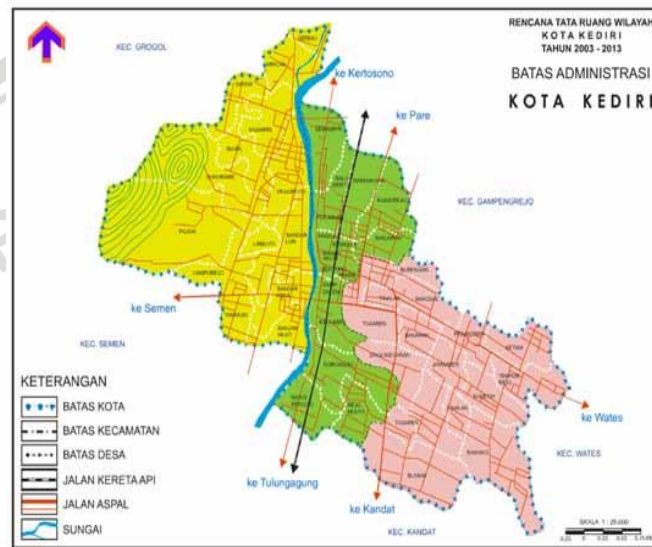
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Letak Geografis dan Administrasi Kota Kediri



Gambar 1.

Peta Kota Kediri

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Dikaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri.

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Grogol.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih.

- c. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen.

Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 Kelurahan;
- b. Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km² terdiri dari 15 Kelurahan;
- c. Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 Kelurahan.

2. Visi dan Misi Kota Kediri

Visi :

“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”

Misi :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai Pusat Pendidikan.

- 4) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Wisata, dan Industri Kreatif.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.¹ Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.²

2. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:³

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;

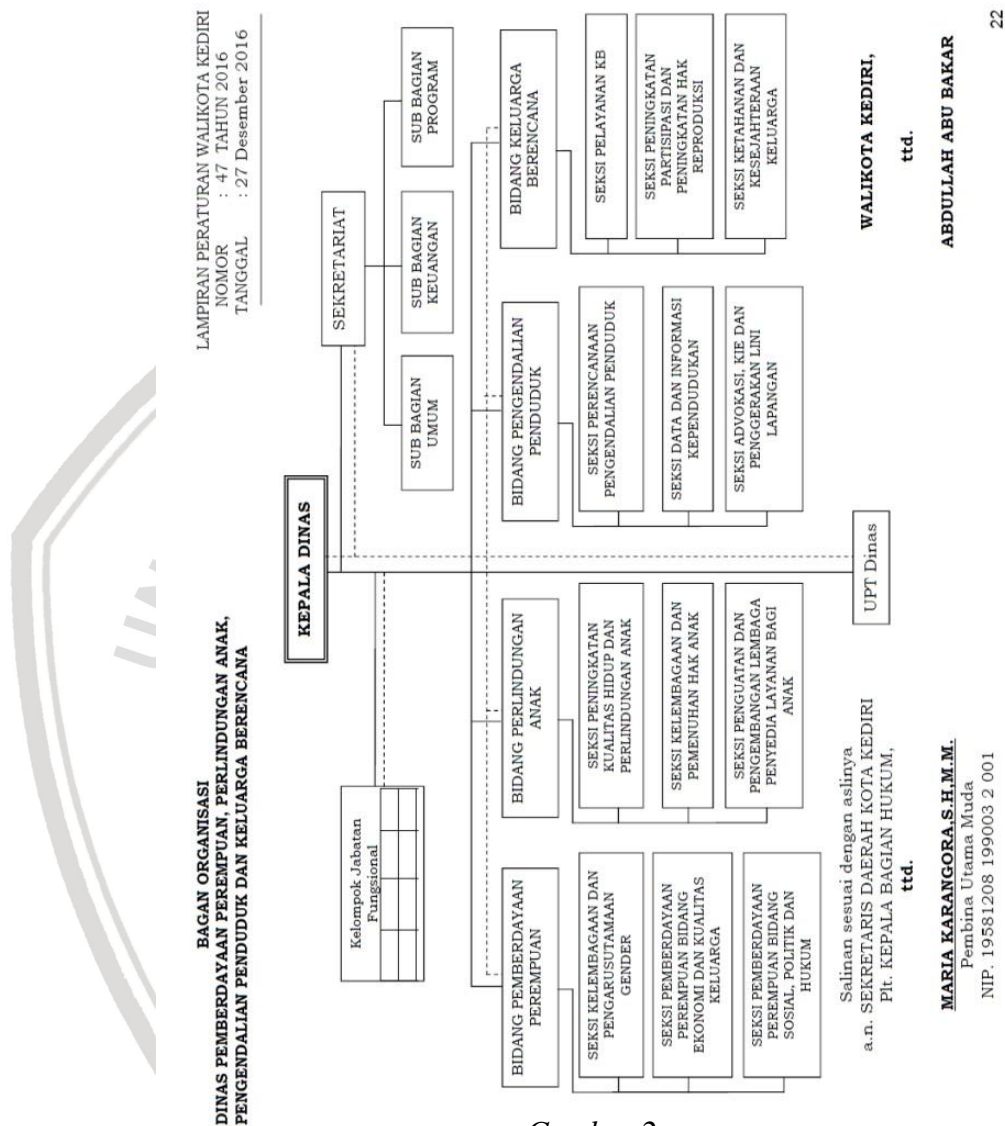
¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

² Ibid, Pasal 2 ayat (2)

³ Ibid Pasal 3 ayat (1)

3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak;
 3. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan;
 3. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Lini Lapangan.
- f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan KB;
 2. Seksi Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Hak Reproduksi;
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri



Gambar 2.

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri⁴

⁴ Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Pada penelitian skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Adapun tugas dari Bidang Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang perlindungan anak.⁵

Sedangkan fungsi dari Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yaitu:⁶

⁵ Ibid Pasal 13 ayat (1)

⁶ Ibid Pasal 13 ayat (2)

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri membawahi tiga seksi bidang dengan tugas yang berbeda, adapun tugas dari tiga seksi bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak mempunyai tugas yaitu :⁷

- menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;

⁷ Ibid Pasal 14

- menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak

Sedangkan Seksi Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas yaitu :⁸

- menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha

⁸ Ibid Pasal 15

dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya;

- menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak.

Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak mempunyai tugas yaitu :⁹

- menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- menyiapkan perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penguatan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- menyiapkan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁹ Ibid Pasal 16

4. Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

C. Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana penyelenggara usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Kediri, dan faktor-faktor mempengaruhi para pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan menerima pengunjung atau konsumen anak, serta upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri beserta Satpol PP Kota Kediri selaku instansi yang melakukan penindakan lapangan terhadap implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, beserta analisis yang dapat menggambarkan dan menguraikan eksistensi dari penyelenggara usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Kediri.

1. Penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Penyelenggaraan usaha hiburan meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis di Kota Kediri merupakan salah satu sumber pendapatan beberapa pelaku usaha sekaligus warga Kota Kediri dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Kediri. Hal ini tentu memberikan implikasi atau dampak positif dari

penyelenggaraan usaha hiburan yang ada di Kota Kediri. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya usaha tempat hiburan meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis di Kota Kediri juga memiliki dampak sosial lain bagi masyarakat, terkhususnya terhadap anak. Hal ini disebabkan karena usaha tempat hiburan yang notabene merupakan sarana hiburan bagi masyarakat usia dewasa ternyata dalam pelaksanaan usahanya juga seringkali menerima pengunjung atau konsumen anak-anak dibawah umur bahkan pelajar. Hal ini justru dapat menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, gangguan yang dimaksud adalah aktivitas usaha tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Kediri. Oleh karena hal tersebutlah, pada tahun 2016 pemerintah Kota Kediri menerbitkan aturan khusus yang berfokus kepada perhatian terhadap tumbuh kembang anak agar terhindar dari setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang memberikan perhatian khusus terhadap tumbuh kembang anak agar terhindar dari setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak terletak pada Pasal 44, yang berbunyi:

- (1) *Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.*

(2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. *diskotek;*
2. *klub malam;*
3. *bar;*
4. *karaoke dewasa;*
5. *pub;*
6. *panti pijat;*
7. *panti mandi uap/sauna; dan*
8. *bidang usaha lain yang sejenis.*

Namun dalam pelaksanaannya, Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak ternyata hingga saat ini masih belum mampu sepenuhnya menekan atau mengurangi permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Kediri, karena masih banyak terdapat pelaku usaha hiburan seperti jenis usaha hiburan yang terdapat dalam Pasal 44 masih sering dijumpai menerima pelanggan atau konsumen anak-anak dibawah umur serta pelajar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri beserta Satpol PP Kota Kediri, maka dapat diketahui tentang bagaimana Penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, dimana masih banyak terdapat pelaku

usaha hiburan sering dijumpai menerima pelanggan atau kosumen anak-anak dibawah umur serta pelajar.

“Dari data serta informasi yang kami dapatkan selaku pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, masih sering ditemuinya di tempat hiburan seperti tempat karaoke dan diskotek menerima pengunjung atau tamu anak-anak dibawah 18 tahun, bahkan anak-anak tersebut juga ada yang bekerja sebagai pemandu lagu pendamping tamu di tempat karaoke, ini jelas memperlihatkan para pelaku usaha hiburan di Kota Kediri masih belum mengindahkan instruksi dari pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, hal ini sangat menghawatirkan kita semua pihak, baik dari pihak kami selaku dinas yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak, serta pihak masyarakat yang juga khawatir terhadap penyelenggara usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut, kami menemukan langsung pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 44 tersebut di lapangan”¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mutakalim selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri tersebut diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata di Kota Kediri masih sering dijumpainya para pelaku usaha hiburan layaknya tempat karaoke dan diskotek masih sering menerima tamu atau pengunjung anak-anak dibawah usia 18 tahun, bahkan anak-anak dibawah umur tersebut ada yang bekerja sebagai pemandu lagu. Hal ini

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mutakalim, Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Pada Kamis 13 September 2018.

tentu sangat jelas telah melanggar Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Usaha karaoke dan diskotek yang dimaksudkan dalam hasil wawancara tersebut diatas termasuk dalam jenis usaha hiburan seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha karaoke dan diskotek harus mematuhi instruksi dari Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri tersebut di mana tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi pelanggan atau konsumen.

Pelanggaran tersebut juga ditegaskan oleh keterangan dari pihak Satpol PP Kota Kediri selaku pihak yang menindak langsung di lapangan terkait penyelenggaraan usaha hiburan yang dalam aktivitasnya masih menerima pelanggan anak dibawah umur.

“Kami selaku pihak Satpol PP Kota Kediri sampai saat ini masih sangat sering menjumpai pelanggaran terhadap Pasal 44 Perda Kota Kediri tersebut yang terang-terangan dilakukan oleh para pelaku usaha tempat hiburan di Kota Kediri ini. Dari permasalahan yang kami jumpai langsung di lapangan para pelaku usaha hiburan masih banyak yang belum mampu bekerjasama dengan petugas/tim dari pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri ini, jadi tidak semua pelaku usaha mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku tersebut, apalagi terhadap peraturan di Pasal 44 yang bersangkutan. Permasalahan pelaku usaha dalam penerimaan pelanggan atau konsumen, kami dari Satpol PP

pernah mendapati beberapa warung remang-remang di kawasan Gor di daerah Kediri ini menerima pelanggan anak-anak bahkan pelajar yang masih memakai seragam sekolah, dan ternyata dari informasi yang kami himpun 70% dari warung remang-remang yang ada di kawasan tersebut menyediakan minuman keras, hal ini jelas mengkhawatirkan sekali. Dilain itu kami Satpol PP juga menjumpai tempat penyewaan game online atau warung internet (warnet) yang sudah jadi rahasia umum selalu dikunjungi anak-anak. Para pelaku usaha tersebut tidak menyaring pengunjung yang datang, yang juga terdapat anak-anak dibawah umur atau pelajar sekolah.”¹¹

Dari hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri serta di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa hadirnya Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak belum mampu mengurangi jumlah permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dengan menerima pengunjung atau konsumen anak-anak dibawah umur.

2. Penerapan Sanksi Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dasar hukum pelarangan terhadap usaha hiburan di Kota Kediri menerima pengunjung atau pelanggan anak dibawah umur adalah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Marina Dewi R., staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Pada Jumat 14 September 2018.

Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Berdasarkan peraturan ini, setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis. Dalam penerapannya, jika ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 44 tersebut, maka akan diberlakukan sanksi terhadap pelaku usaha sesuai ketentuan pada Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 44 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.*

Namun dari hasil wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, belum sepenuhnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 tersebut mengacu kepada Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

“Untuk pemberian sanksi kepada para pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 44 Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tersebut, oleh kami selaku pihak yang mengeksekusi di lapangan, selama ini pemberian sanksi belum sepenuhnya mengacu kepada Pasal 53 Perda Kota Kediri No. 6/2016 tersebut. Memang untuk pemberlakuan sanksi pelanggaran tersebut ditangani oleh Satpol PP Kota Kediri, namun dari Satpol PP belum bias menerapkan sanksi Pidana sesuai Pasal 53 Perda Kota Kediri No. 6/2016 tersebut, karena sampai saat ini Satpol PP belum bisa menindak sanksi yang termasuk kedalam sanksi pidana ringan. Jadi sampai hari ini jika kami pihak Satpol PP Kota Kediri menemui pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan pada Pasal 44 tersebut hanya memberi teguran berupa teguran secara lisan kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dengan masalah ini.”¹²

Dari keterangan hasil wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa selama ini pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak masih hanya sebatas pemberian teguran berupa teguran lisan kepada para pelak usaha yang telah melanggar Peraturan Daerah terkait.

D. Faktor Kendala serta Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

¹² Wawancara dengan Ibu Marina Dewi R., staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Pada Jumat 14 September 2018.

1. Faktor Kendala Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Dilihat dari sudut pandang proses bekerjanya hukum maka dapat dilihat telah terjadi regenerasi norma-norma hukum yaitu terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Proses ini juga sering disebut sebagai proses konkretisasi, dimana norma-norma hukum dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Dengan demikian maka bangunan tata hukum lalu dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang (Stufenbau). Dalam ilmu hukum dogmatis maka bekerjanya hukum ini lalu dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi dan sebagainya.

Melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi yaitu memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembahasan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, menelaah hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat. Apabila hukum itu lalu dilihat sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka manusia tidak

dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum.¹³

Berbagai faktor dapat memberikan pengaruhnya bagi bekerjanya hukum di masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial dan manusia (personal). Faktor-faktor sosial dan personal yang banyak memberi pengaruh pada bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.¹⁴ Telaah tentang hukum yang memperhatikan pengaruh dari nilai-nilai serta sikap-sikap terhadap sistem hukum dikembangkan melalui suatu konsepsi tentang kultur budaya. Oleh Lawrence M. Friedman, kultur budaya dirumuskan sebagai berikut:¹⁵

“Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.”

Selanjutnya oleh Lawrence M. Friedman, untuk kepentingan analisis penulis pada penelitian skripsi ini, sistem hukum yang beroperasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang berisi tiga komponen. Komponen-komponen tersebut adalah :¹⁶

¹³ Satjipto, Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Penerbit Angkasa, 1990, hal. 48

¹⁴ Ibid, halaman 10

¹⁵ Ibid, halaman 56

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Semarang, C.V. Agung, 1989, hal. 23

1. *Komponen struktural*, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur pengadilan yang berupa hakim yang bersidang dengan yurisdiksi tertentu, badan pembuat undang-undang dan juga konstitusi tertulis merupakan contoh-contoh apa yang dimaksud komponen struktural hukum.
2. *Komponen substansi*, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substantif dari suatu sistem hukum, umpamanya keputusan yang dibuat oleh pengadilan juga setiap keputusan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah, merupakan substansi.
3. *Komponen budaya hukum*, berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat, yang akan menentukan apakah pengadilan dimanfaatkan atau tidak, apabila menghadapi suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan maksud untuk berperkara di muka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan berperkara di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari.

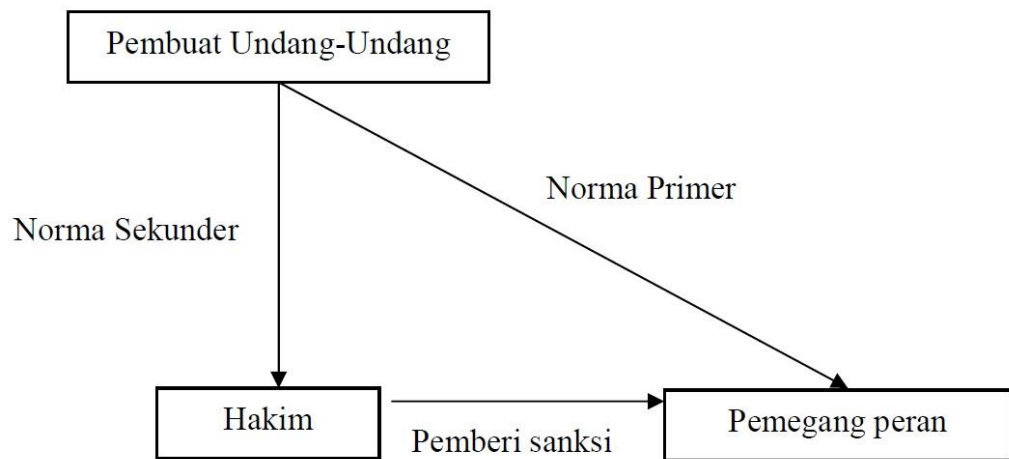
Dengan demikian yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh

tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, terdapat sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan merupakan hasil dedukasi dari substansi dan struktur. Termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan karena memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas sosial yang berbeda-beda.

Peraturan hukum yang melarang seorang anggota masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan sanksi bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut dideskripsikan dalam bagan sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Satjipto, Rahardjo, Op.cit hal. 24



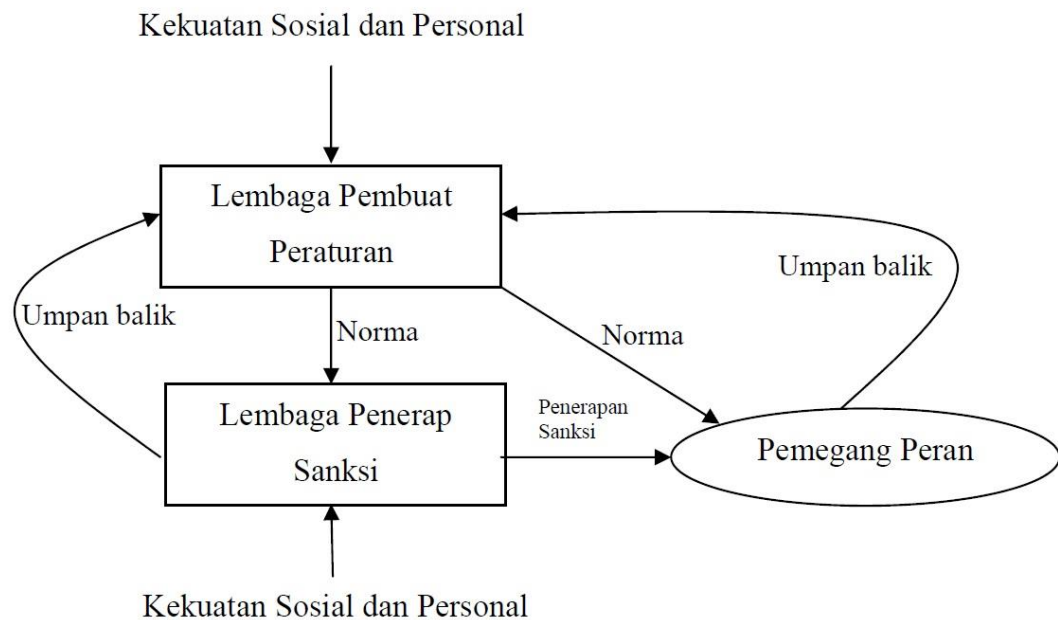
Gambar 3.

(Robert B. Seidman, 1972)

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Setiap konsep hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam suatu bagan mengenai

bekerjanya hukum dalam masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut :¹⁸



Gambar 4.

(Chambliss & Seidman, 1971)

Dalam bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :¹⁹

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-

¹⁸ Satjipto, Rahardjo, Op.cit, hal. 26

¹⁹ Satjipto, Rahardjo, Op. cit., hal. 27

lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dalam kutipan di atas dapat diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh para peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum²⁰ dan peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap

²⁰ Satjipto, Rahardjo, Op.cit., hal. 28

lembaga-lembaga hukum serta tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya.²¹

Berangkat dari model bekerjanya hukum didalam masyarakat yang disusun oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang menjadi acuan analisis penulis pada penelitian skripsi ini, mengamati bahwa Pemerintah Kota Kediri dengan beberapa organ lembaga penerap sanksi memang dihadapkan pada banyak tantangan dalam hal penyelenggaraan pengembangan Kota Layak Anak. Meskipun Peraturan Daerah telah dibuat sedemikian rupa agar usaha hiburan yang beroperasi di Kota Kediri berjalan dengan baik tanpa menerima pengunjung anak-anak dibawah umur, namun masih saja banyak masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan pelarangan usaha hiburan menerima pengunjung anak-anak.

Untuk menelaah bagaimana umpan balik dari masyarakat sebagai Pemegang Peran terhadap pemberlakuan norma hukum serta penerapan sanksi pada model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat, dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri beserta Satpol PP Kota Kediri menemui beberapa kendala dalam penerapannya, seperti pada keterangan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

²¹ Satjipto, Rahardjo, Op. cit., hal. 29

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri berikut ini:

“Dari kami selaku pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri menemui kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, terkhusus penyelenggaraan pada Pasal 44 serta sanksi pada Pasal 53, faktor kendala yang kami temui yaitu belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, masih adanya ego sektoral, terbatasnya anggaran, serta yang paling vital adalah ketidaktahuan masyarakat Kota Kediri terhadap adanya Peraturan Daerah yang fokus terhadap perlindungan anak di Kota Kediri ini.

Hal tersebut menyebabkan keberadaan Peraturan Daerah tersebut belum berfungsi secara optimal di tengah masyarakat, kami rasa perlu penjabaran dalam bentuk Peraturan Walikota, dan Surat Keputusan Pelaksanaan di masing-masing OPD, dan harus terus menerus di sosialisasikan kepada masyarakat, agar Peraturan Daerah bersangkutan dapat diimplementasikan secara optimal dan bersinergi antar OPD terkait.”²²

Untuk mengamati bagaimana umpan balik dari masyarakat sebagai Pemegang Peran terhadap pemberlakuan norma hukum serta penerapan sanksi pada model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat penulis juga menelaah bagaimana Kendala dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang

²² Wawancara dengan Bapak Mutakalim, Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Pada Kamis 13 September 2018.

Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang juga dirasakan oleh Satpol PP Kota Kediri, pada hasil wawancara berikut ini:

“Pihak Satpol PP Kota Kediri tentu menemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat pemberlakuan Pasal 44 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tersebut, factor kendala yang kami temui yaitu tidak diberlakukannya penerapan Pasal 44 pada peraturan daerah tersebut oleh pelaku usaha yang ada di Kota Kediri. Jadi yang kami temui penghambatnya adalah dari pelaku usaha yang kurang mengerti tentang penerimaan tamu atau pelanggan yang datang, mulai dari jenis usaha yang diperbolehkan, waku atau jam buka, sampai dengan aturan penerimaan pelanggan atau konsumen mana saja yang diperbolehkan untuk mengunjungi tempat usaha hiburan di Kota Kediri.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah terkait perlindungan terhadap tumbuh kembang anak ini, Satpol PP Kota Kediri juga sudah sering menjumpai kegiatan pelaku usaha yang mernyalahi aturan terkait perlindungan anak ini. Setelah diberlakukan Perda terkait pun permasalahan terkait juga belum berkurang, karena belum semua lapisan masyarakat yang memahami aturan ini, hal ini terkait sosialisasi yang kurang kepada masyarakat terkait Perda Kota Layak Anak, seharusnya pemilik usaha tahu akan adanya perda yang mengatur tersebut.”²³

Hal-hal yang menjadi kendala bagi pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Satpol PP Kota Kediri dalam melakukan pengendalian terhadap para penyelenggara usaha hiburan dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat Kota Kediri, terlebih lagi

²³ Wawancara dengan Ibu Marina Dewi R., staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Pada Jumat 14 September 2018.

para penyelenggara usaha hiburan yang juga merupakan Pemegang Peran pada model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat, tidak memahami seutuhnya tentang Peraturan Daerah terkait, serta masyarakat pun juga tidak memahami Peraturan Daerah yang dimaksud dengan baik.

Dari hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan maka dapat dianalisa dengan berpedoman kepada model bekerjanya hukum didalam masyarakat yang disusun oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang menjadi acuan analisis penulis pada penelitian skripsi ini, dimana kendala Pemerintah Kota Kediri dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yaitu:

- a. Belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal ini merupakan langkah yang sangat urgen dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat disinkronisasikan dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dipahami dari model teori

bekerjanya hukum didalam masyarakat bahwa untuk menalaah bagaimana umpan balik dari Lembaga Penerap Sanksi terhadap norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tersebut tentu hanya dapat diamati jika sudah tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

- b. Masih adanya ego sektoral di sektor lembaga pemerintahan di Kota Kediri.

Dengan meredakan ego sektoral di sektor lembaga pemerintahan di Kota Kediri diharapkan dapat menunjang koordinasi lembaga pemerintahan di Kota Kediri. Hal ini jika diamati dari model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat maka koordinasi sektoral yang baik di sektor lembaga pemerintahan di Kota Kediri akan dapat melahirkan umpan balik yang positif pada masyarakat selaku Pemegang Peran dari diterapkannya norma pada Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

- c. Terbatasnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri untuk melakukan berbagai program kerja yang fokus kepada perlindungan tumbuh kembang anak.

- d. Ketidaktahuan masyarakat Kota Kediri terhadap adanya Peraturan Daerah yang fokus terhadap perlindungan anak di Kota Kediri.

Jika dipahami dari model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat yang disusun oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, fenomena bahwa pemahaman masyarakat Kota Kediri terhadap adanya Peraturan Daerah yang fokus terhadap perlindungan anak di Kota Kediri merupakan hal yang sangat penting dalam komponen bekerjanya hukum didalam masyarakat, dimana masyarakat itu sendiri merupakan Pemegang Peran yang akan memberikan umpan balik dai diterapkannya norma pada Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, baik itu umpan balik yang diberikan kepada komponen struktural, maupun komponen substansi atau umpan balik yang berdasarkan kultur yang ada di masyarakat. Jika masyarakat Kota Kediri memahami dengan baik adanya Peraturan Daerah yang fokus terhadap perlindungan anak di Kota Kediri maka umpan balik yang diberikan masyarakat selaku Pemegang Peran akan dapat ditangkap dengan baik pula oleh Lemabaga Pembuat Peraturan, sesuai model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat.

- e. Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tersebut

belum berfungsi secara optimal di tengah masyarakat terkait peran perlindungan tumbuh kembang anak dari usaha hiburan.

Dipahami dari model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat yang disusun oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, maka jika norma pada Peraturan Daerah Kota Kediri belum berfungsi secara optimal di tengah masyarakat maka hal ini akan berpengaruh buruk kepada Lembaga Penerap Sanksi sebab sanksi yang akan diterapkan belum mampu diberlakukan kepada pelaku pelanggaran norma pada Peraturan Daerah Kota Kediri tersebut yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha hiburan di Kota Kediri.

- f. Belum ada penjabaran Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana yang lebih khusus.

Hal ini tentu akan mempengaruhi bagaimana Lembaga Pembuat Peraturan dapat memberikan regenerasi norma atau pemberlakuan norma dengan baik, berangkat dari model teori bekerjanya hukum didalam masyarakat dimana Lembaga Penerap Sanksi serta masyarakat selaku Pemegang Peran akan memberikan umpan balik jika norma-norma hukum sudah di regenarikan dengan baik oleh Lembaga Pembuat Peraturan.

- g. Belum ada Surat Keputusan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Pengembangan Kota Layak Anak di masing-masing OPD terkait.

- h. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak kepada masyarakat.
- i. Pelaku usaha hiburan di Kota Kediri belum memahami secara utuh Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tentang adanya larangan menerima pelanggan anak dibawah umur.

2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul mengenai penyelenggaraan usaha hiburan yang menerima pengunjung anak-anak dibawah umur yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta dengan Satpol PP Kota Kediri telah melakukan banyak upaya agar dapat memberlakukan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dengan sangat baik. Upaya-upaya tersebut penulis himpun dalam hasil wawancara berikut ini:

“Upaya yang telah kami lakukan selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri untuk pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 44 tersebut yaitu kami berupaya terus menerus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Anak di setiap Kelurahan yang ada di Kota Kediri, melakukan operasi rutin oleh Satpol PP di tempat-tempat hiburan layaknya tempat karaoke maupun diskotek yang masih menerima pengunjung anak dibawah umur bahkan mempekerjakan anak di lokasi usaha hiburan tersebut. Semua upaya yang telah kami lakukan tentu masih perlu banyak evaluasi.

Upaya yang telah kita lakukan ini juga sudah banyak mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, ada dari beberapa LSM, dan media online serta tentunya dukungan dari Satpol PP Kota Kediri.”²⁴

Upaya untuk pengoptimalan pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak juga dipertegas oleh Satpol PP Kota Kediri.

“Kami dari pihak Satpol PP meninjau bahwa penerapan dari Pasal 44 Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tersebut sudah berjalan 65% dari instansi terkait, upaya-upaya penerapan ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholder diantaranya masyarakat yang sudah memahami Peraturan Daerah Kota Layak Anak, terwujud dalam pelaksanaanya di beberapa kelurahan di Kota Kediri sudah mulai didirikan sudut-sudut bermain untuk

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mutakalim, Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Pada Kamis 13 September 2018.

anak, dan sudah mulai memperhatikan permasalahan terkait anak di lingkungan sekitar.

*Serta dukungan dari Relawan Perlingungan Perempuan Dan Anak yang sudah mulai ada di beberapa kelurahan di Kota Kediri yang terdiri dari 18 anggota relawan, dengan kegiatan yang berfokus kepada perhatian terhadap permasalahan perempuan dan anak di keluarahan terkait.*²⁵

Dari hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan dapat dianalisa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu:

- a. Tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 44 tersebut yaitu berupaya terus menerus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak kepada semua lapisan masyarakat.

Sosialisasi yang terus menerus dilakukan kepada semua lapisan masyarakat telah dilakukan dengan intensitas yang meningkat, hal ini tentu dengan tujuan agar dapat menjaga tumbuh kembang anak agar dapat terlaksana jauh dari bahaya buruk lokasi-lokasi yang menjadi tempat usaha hiburan malam yang dikhawatirkan dapat membuat terganggunya tumbuh kembang anak.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Marina Dewi R., staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Pada Jumat 14 September 2018.

- b. Pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Anak di setiap Kelurahan yang ada di Kota Kediri.

Ini merupakan program terobosan yang dapat memaksimalkan dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, karena dengan adanya Satuan Petugas Perlindungan Anak di setiap Kelurahan yang ada di Kota Kediri membuat semua pihak ikut terlibat dengan aktif, baik itu masyarakat, maupun pemerintah Kota Kediri.

- c. Melakukan operasi rutin oleh Satpol PP Kota Kediri di tempat-tempat hiburan layaknya tempat karaoke maupun diskotek yang masih menerima pengunjung anak dibawah umur bahkan mempekerjakan anak di lokasi usaha hiburan tersebut.

Dengan operasi rutin oleh Satpol PP Kota Kediri ini menjadi terlaksananya pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, karena peraturan tanpa pelaksanaan tidak akan dapat mencapai tujuan dengan baik.

- d. Memperoleh dukungan dari berbagai pihak, ada dari beberapa LSM, dan media online serta tentunya dukungan dari Satpol PP Kota Kediri.

Dukungan dari banyak stakeholder yang telah terlibat aktif sangat membantu terwujudnya tujuan dari pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, namun masih sangat banyak lagi dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan tumbuh kembang anak agar tujuan baik dari amanat peraturan perundang-undangan dapat terlaksana.

3. Solusi Terhadap Kendala Dalam Pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi lapangan yang telah penulis lakukan, dapat dianalisa mengenai solusi terhadap kendala dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Solusi tersebut dikelompokkan atas dua bagian solusi penting, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan pelanggaran, yang dalam hal ini penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dengan menerima pelanggan anak dibawah umur pada usaha hiburan.

Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan bahaya gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh tempat hiburan yang bukan merupakan kawasan layak untuk anak di Kota Kediri.
- b. Memberi penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian terhadap anak untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar dapat membentengi diri dengan baik sesuai kepercayaan yang dianut.
- c. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada anak agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan usaha hiburan yang mengganggu tumbuh kembang anak.
- d. Memperbanyak kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Kediri. Seperti di sekolah, di desa/kelurahan, dan lokasi lainya di Kota Kediri.

- e. Memperbanyak patroli keliling oleh Satpol PP Kota Kediri pada daerah-daerah lokasi usaha hiburan yang sering di datangi anak-anak dan peajar.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya pelanggaran. Adapun upaya represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 44 sesuai dengan ketentuan sanksi pada Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, dimana harus diberlakukan sanksi denda serta sanksi kurungan penjara bagi pelaku usaha yang membiarkan dengan sengaja menerima pelanggan anak-anak dibawah umur. Hal ini dapat memberikan efek jera agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali.
- b. Melalui pihak kepolisian dapat melakukan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap

pelaku usaha hiburan yang menerima pelanggan anak-anak dibawah umur, agar dapat melindungi tumbuh kembang anak sesuai dengan tujuan mulia dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Dengan peran Penegak hukum seperti halnya polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat, menangani kasus pelanggaran, agar para anggota masyarakat dapat hidup dan dalam keadaan aman dan tentram²⁶.

²⁶ Bahtiar Efendi. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia. UGM. Jogjakarta. 1981. Hal 1

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis adalah:

1. Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik di Kota Kediri karena belum mampu menekan masalah yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Seperti yang diketahui bersama bahwa di Kota Kediri masih sering dijumpai para pelaku usaha hiburan layaknya diskotek dan tempat karaoke yang menerima tamu atau pengunjung anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan anak di bawah umur tersebut bekeja sebagai pendamping tamu ataupun pemandu lagu dan terdapat beberapa warung di beberapa titik di daerah Kota Kediri yang menjual minum keras secara bebas untuk pengunjung anak-anak. Terkait dengan pemberian sanksi, belum sepenuhnya mengacu kepada Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak karena pada kenyataannya penerapan sanksi hanya berupa pemberian teguran secara lisan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 44

Peraturan daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

2. Kendala Pemerintah Kota Kediri dalam pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yaitu:

- a). Belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

- b). Masih adanya ego sektoral di sektor lembaga pemerintahan di Kota Kediri.

- c). Terbatasnya anggaran pada DP3AP2KB Kota Kediri untuk melakukan kegiatan yang berfokus pada perlindungan tumbuh kembang anak.

- d). Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak kepada masyarakat dan pelaku usaha hiburan di Kota Kediri.

- e). Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tersebut belum berfungsi secara optimal di tengah masyarakat.

- f). Belum ada penjabaran Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana yang lebih khusus.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pemberlakuan Pasal 44 *juncto* Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu:

- a). Melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 44 *juncto* Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak kepada semua lapisan masyarakat.
- b). Pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Anak di setiap Kelurahan yang ada di Kota Kediri.
- c). Melakukan operasi rutin oleh Satpol PP Kota Kediri di tempat usaha hiburan layaknya tempat karaoke maupun diskotek.
- d). Memperoleh dukungan dari berbagai pihak, ada dari beberapa LSM, dan media online serta tentunya dukungan dari Satpol PP Kota Kediri.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Kediri

- . Dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dari kegiatan layaknya mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak terutama fokus dalam perlindungan tumbuh kembang anak;

-. Memperbanyak kegiatan patroli keliling oleh Satpol PP Kota Kediri pada lokasi kegiatan usaha hiburan yang sering dikunjungi oleh anak-anak maupun pelajar;

-. Diharapkan kepada aparat penegak hukum Kota Kediri seperti Kepolisian beserta Satpol PP untuk dapat menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 44 sesuai dengan ketentuan sanksi pada Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, dimana harus diberlakukan sanksi denda beserta sanksi kurungan penjara bagi pelaku usaha yang membiarkan dengan sengaja menerima pelanggan anak-anak dibawah umur guna memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan.

2. Bagi Masyarakat

-. Menghimbau masyarakat agar dapat memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada anak untuk mengisi waktu luang sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan usaha hiburan yang mengganggu tumbuh kembang anak;

-. Memberikan pemahaman kepada anak dalam pendidikan di rumah tentang lingkungan yang kondusif dan ramah untuk tumbuh kembang anak. Diharapkan peran aktif masyarakat ini dapat menunjang pemberlakuan Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dapat diberlakukan dengan maksimal, dan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Solihin Wahab, 2005, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Bagir Manan, 1995, **Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah**, Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Bambang Waluyo, 2005, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bertens,K, 2007, **Etika**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gunarsa, Singgih, D, 1985, **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Lenny Rosalin, dkk, 2017, **Bahan Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak**, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Maria Farida Indrati, 2007, **Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7**, Yogyakarta: Kanisius.
- Nurdin Usman, 2004, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nyoman.I Surmayadi, 2005, **Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Jakarta : Citra Utama.
- P. Joko Subagyo, 1997, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ryant Nugroho Dwijowijoto, 2003, **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum**, Semarang, C.V. Agung, 1989.
- Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Bandung : Penerbit Angkasa, 1990.
- Spock, Benyamin, 2000, **Menghadapi Anak di Saat Sulit**, Jakarta: Pustaka Delapratasa.
- Srijanti & A. Rahman, **Etika Berwarga Negara. (ed.2)**, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

- Sujianto, 2008, **Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik**. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sunggono, Bambang, Harianto, Aries, 2009, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- Syaukani, dkk, 2004, **Otonomi Dalam Kesatuan**, Yogyakarta : Yogya Pustaka.
- William Dunn, 1998, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

JURNAL :

- Unicef-Innocenti Research Centre, 2004, Building Child Friendly Cities, A Framework for Action, UNICEF, Florence.
- Tim Penyusun, Panduan Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 169.
- Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri No. 42.

INTERNET :

David Setyawan, 2017, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual>.

Redaksi Elsam, Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, <http://www.elsam.or.id/mobileweb/article>.

<http://thelawdictionary.org/child/>

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>

<http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi>.

Hak-hak.Anak.

